



Judul : Lewat daring, kampanyekan kebebasan beragama
Tanggal : Selasa, 02 April 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Lewat Daring, Kampanyekan Kebebasan Beragama

Di pengujung masa jabatannya, DPR RI gencar mengkampanyekan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Para wakil rakyat itu mengaplikasikannya melalui perangkat daring (online toolkit). Kampanye ini bekerja sama dengan ASEAN Parliamentarians for Human Right dan National Democratic Institute (NDI).

ONLINE tentang KBB itu bisa diakses di situs www.forb-asia.org. Website tersebut juga akan ditautkan dalam situs resmi DPR di www.dpr.go.id.

"Dalam website tersebut terdapat berbagai materi yang berhubungan dengan HAM (hak asasi manusia, Red). Khususnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat meluncurkan perangkat

daring tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/4).

Dia menyebutkan, setiap anggota DPR dapat memanfaatkan perangkat bantu daring tersebut untuk membagikan berbagai pengalaman mereka tentang Indonesia Meskipun majemuk dan plural dari sisi agama dan keyakinan, tapi rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis," ujarnya

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, semangat DPR mengkampanyekan kebebasan beragama dan berkeyakinan sejalan dengan semangat bangsa Indonesia. Sesuai konstitusi negara, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jaminan konstitusi tersebut diper-

kuat lagi dengan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 175 KUHP, UU 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, maupun UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Ini menunjukkan, dari segi legal konstitusional, negara telah hadir mengayomi seluruh rakyat Indonesia untuk beragama dan berkeyakinan sesuai kepercayaan yang dianutnya," jelas Bamsoe, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Bamsoet mengatakan, selain dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, perangkat bantu daring tersebut juga bisa memberikan informasi sekaligus memperkuat jaringan setiap anggota

DPR. Sehingga antaranggota parlemen, khususnya dari kawasan Asia Tenggara, bisa saling membagikan pengalaman keberhasilan (*best practise*).

“Sejak dulu penganut agama dan aliran kepercayaan di Indonesia bisa hidup damai berdampingan. Menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara dunia betapa perbedaan agama dan keyakinan justru menguatkan pondasi kebangsaan. Bukan malah menjadi sumber pemicu perpecahan,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari menambahkan, parlemen Indonesia dapat berkontribusi menjadi pusat ilmu keparlemenan sehingga terbangun tradisi intelektual di DPR, dalam hal ini melalui sarana daring.

“Modul-modul yang ada dalam da-

ring itu saat ini belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Karena itu, dengan peluncuran ini berbagai bahan itu diharapkan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,” ujarnya.

Eva yang juga anggota Dewan Kehormatan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) itu menjelaskan, online toolkit ini merupakan kulminasi dari proyek bersama APHR dan National Democratic Institute (NDI) terkait KKB yang bertujuan untuk meningkatkan peran anggota parlemen dalam memproteksi KKB di kawasan Asia Tenggara. (aen)



Bambang Soesatyo

CHARLIE/INDOPOS